

Pedoman Evaluasi Mutu Internal Institut Teknologi Sumatera (Sumber: Kemdikbud)

A. Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*) perlu dilakukan.

Sesuai dengan Permendinas Nomor 36 Tahun 2010 Pasal 717, maka Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penjaminan mutu pendidikan.

Pedoman Pengisian Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi ini disusun untuk melengkapi (1) Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi, (2) Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi, serta (3) Pedoman Pemanfaatan Data Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Substansi Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi disusun dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kerjasama.

Substansi Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI PT) juga disusun dengan mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Butir 27 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Tujuan EMI-PT ini untuk (1) membantu perguruan tinggi dan pemerintah menetapkan program pengembangan menuju pemenuhan SNP, dan (2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil evaluasi internal dengan eksternal.

Selain mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi juga ditetapkan berdasarkan: (1) berbagai standar yang berlaku di dunia internasional (AUN, Webometric) untuk membantu pemerintah dan perguruan tinggi mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah regional dan internasional, (2) keberagaman potensi dan sumber daya Perguruan Tinggi di Indonesia, serta (3) contoh praktek baik yang ada di Indonesia.

Di samping hal-hal pokok yang dikemukakan sebelumnya, EMI PT dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu perguruan tinggi, memfasilitasi *resource sharing* dan *partnership* antar-PT maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik yang bersifat pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah.

EMI PT merupakan instrumen evaluasi diri yang akan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di

Indonesia, tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model evaluasi yang terus berkembang secara dinamis.

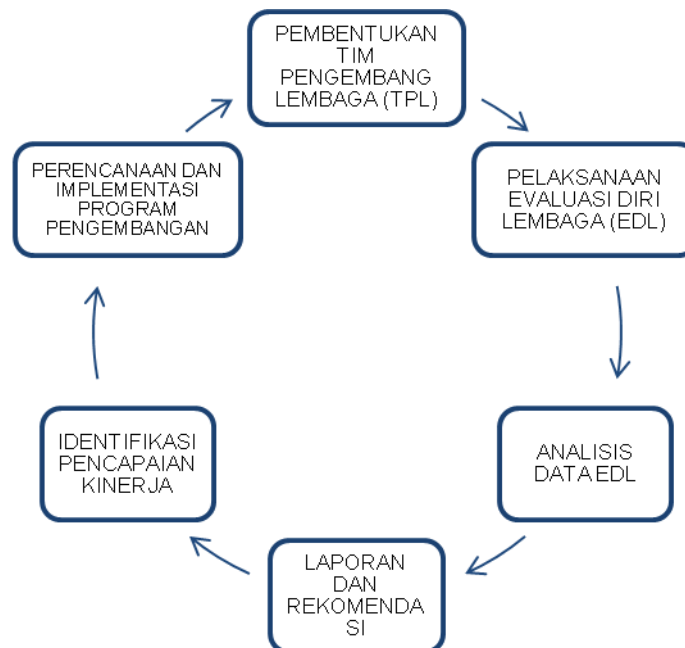
Di bagian awal dari alat EMI PT didahului dengan mengisi identitas PT yang bersangkutan (nama PT, alamat, jumlah prodi dst.) sebagai deskripsi data dasar yang berguna sebagai dasar analisis dan penetapan kebijakan nasional.

B. Strategi pelaksanaan EMI-PT

Pelaksanaan EMI di UPT diawali dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu PT (TPM-PT). Kemudian TPM-PT melaksanakan EMI dengan mengisi instrumen EMI yang disertai bukti fisik pendukungnya. Selanjutnya TPM-PT melakukan analisis hasil EMI sampai menyusun laporan EMI.

EMI dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dan hasilnya digunakan sebagai dasar bagi perencanaan kegiatan dan pengembangan kapasitas PT menuju tercapainya atau terlampauinya 11 SNP-PT.

Berikut ini diagram yang menunjukkan mekanisme siklus kerja EMI, termasuk tugas dan tanggung jawab tim pengembang.



Gambar 1. Siklus pelaksanaan EMI

Aktivitas pada setiap tahapan siklus pelaksanaan EMI diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PT (TPM-PT)

Kalau belum ada, Pimpinan PT membentuk tim pengembang PT (TPM-PT) yang beranggotakan unsur pimpinan, pejabat fungsional dan perwakilan semua unit kerja.

2. Pelaksanaan EMI

TPM-PT menggunakan instrumen EMI untuk mengumpulkan data tentang kinerja PT yang merujuk pada 11 SNP-PT dengan dimensi - komponen - indikator yang tertuang dalam instrumen EMI dengan menyertakan bukti-bukti fisik pendukung. Proses pengumpulan data melibatkan personil perwakilan PT.

3. Analisis Data

TPM-PT melakukan analisis hasil EMI berdasarkan pencapaian skala kinerja pada setiap indikator pada komponen yang telah ditetapkan. Untuk mempercepat dan memudahkan proses analisa data perlu menggunakan aplikasi software yang memadai berbasis IT.

4. Laporan dan Rekomendasi

TPM-PT menyusun laporan EMI dan mengarsipkan bukti fisik yang digunakan dengan tertib. Selanjutnya TPM-PT membuat rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan PT secara berkelanjutan.

5. Identifikasi Pencapaian Kinerja PT

Pada laporan kinerja PT, rekomendasi, dan laporan EMI mencerminkan identifikasi pencapaian kinerja PT. Instrumen EMI terdiri atas 11 Standar, 19 komponen, dan 99 indikator.

6. Perencanaan dan Implementasi Program Pengembangan

TPM-PT menggunakan informasi hasil EMI untuk perbaikan kinerja PT dalam pencapaian 11 SNP-PT dengan menyusun rencana pengembangan PT berdasarkan hasil laporan EMI dan rekomendasinya.

C. Pandauan Pengisian EMI

1. Pengisian Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI PT) dimulai dengan mengisi identitas PT yang bersangkutan
2. Isian EMI PT mencakup 11 standar, 19 komponen, dan 99 indikator.
3. Seluruh indikator yang tertera pada Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan skor 1 sampai 7.
4. Skor 1 sampai 7 mengacu pada dasar pentahapan pada setiap indikator sebagai berikut:
 - 1= Sama sekali tidak mencukupi , perbaikan harus segera dilakukan (*absolutely inadequate; immediate improvements must be made*)
 - 2= Tidak mencukupi , perlu perbaikan besar (*inadequate, improvements necessary*)
 - 3= Kurang mencukupi , perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (*inadequate, but minor improvements will make it adequate*)
 - 4= Mencukupi sesuai yang diharapkan (*adequate as expected*)
 - 5= Lebih dari mencukupi (*better than adequate*)
 - 6= Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (*example of good practice*)
 - 7= Sangat baik *excellent*
5. Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing komponen dapat diacu pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.
6. Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indikator dalam masing-masing komponen sesuai dengan pentahapan yang berjalan internal di masing-masing perguruan tinggi, dengan mengacu pada criteria-kriteria yang tertera pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.
7. Setelah pengisian dilakukan, Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan data evaluasi mutu internal dengan mengacu pada Pedoman Pemanfaatan Data Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.

8. Data evaluasi mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Perguruan Tinggi melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.
9. Apabila diperlukan konsultasi atas hasil pengisian yang diperoleh termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan, maka Perguruan Tinggi yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional), serta *stakeholders*. Data-data juga dapat dipergunakan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi masukan bagi pembinaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, maupun pengembangan pendidikan nasional.

ALAT EVALUASI MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI INDONESIA

**Oleh Tim Penyelaras
Bidang Penjaminan Mutu Dikmendikti**

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
A. Standar Isi								
1.	Kurikulum							
	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (5 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
B. Standar Proses								
2.	Pengembangan Mutu Pembelajaran							
	2.1 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.	7	6	5	4	3	2	1
	2.2 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.	7	6	5	4	3	2	1
	2.3 Kejelasan pedoman pelaksanaan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.	7	6	5	4	3	2	1
	2.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	2.5 Penerapan (metode pembelajaran yang mempergunakan) pendekatan <i>student-centered learning</i> .	7	6	5	4	3	2	1
	2.6 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.	7	6	5	4	3	2	1
	2.7 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri.	7	6	5	4	3	2	1

	Rata-rata Skor (7 Indikator)	
--	-------------------------------------	--

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
3.	Suasana Akademik							
	3.1 Kejelasan dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	7	6	5	4	3	2	1
	3.2 Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	7	6	5	4	3	2	1
	3.3 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat seni dan budaya bagi mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (3 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
C. Standar Kompetensi Lulusan								
4.	Kelulusan Mahasiswa							
	4.1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	4.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	4.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.	7	6	5	4	3	2	1
	4.4 Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	7	6	5	4	3	2	1
	4.5 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.	7	6	5	4	3	2	1
	4.6 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.	7	6	5	4	3	2	1
	4.7 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama.	7	6	5	4	3	2	1
	4.8 Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreuner</i> dalam tiga tahun terakhir	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (8 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
5.	Prestasi Mahasiswa							
	5.1 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional.	7	6	5	4	3	2	1
	5.2 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (2 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
D.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
6.	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
	6.1 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan.	7	6	5	4	3	2	1	
	6.2 Ketersediaan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1	
	6.3 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1	
	6.4 Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (4 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
E.	Standar Sarana dan Prasarana								
7.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan								
	7.1	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.	7	6	5	4	3	2	1
	7.2	Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, bengkel/sudio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.	7	6	5	4	3	2	1
	7.3	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, <i>green area</i> , fasilitas <i>difable</i> dan ruang bimbingan dan konseling.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor(3 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
8.	Ketersediaan Sistem Informasi								
	8.1 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk <i>band width, hardware, software, e-learning, dan on-line journal/library</i> .	7	6	5	4	3	2	1	
	8.2 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup <i>hardware dan software</i> .	7	6	5	4	3	2	1	
	8.3 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> per mahasiswa yang memadai.	7	6	5	4	3	2	1	
	8.4 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	7	6	5	4	3	2	1	
	8.5 <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (5 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
F.	Standar Pengelolaan								
9.	Tata Pamong								
	9.1 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan implementasi secara konsisten.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (1 Indikator)								
10.	Kepemimpinan								
	10.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.	7	6	5	4	3	2	1	
	10.2 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (2 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
11.	Sistem Pengelolaan							
	11.1 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.	7	6	5	4	3	2	1
	11.2 Diseminasi hasil kerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (2 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
12.	Seleksi Mahasiswa Baru							
	12.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.	7	6	5	4	3	2	1
	12.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	12.3 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.	7	6	5	4	3	2	1
	12.4 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.	7	6	5	4	3	2	1
	12.5 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.	7	6	5	4	3	2	1
	12.6 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	7	6	5	4	3	2	1
	12.7 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (7 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
13.	Kualitas Layanan kepada Mahasiswa							
	13.1 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	7	6	5	4	3	2	1
	13.2 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	7	6	5	4	3	2	1
	13.3 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i> , beasiswa, dan kesehatan.	7	6	5	4	3	2	1
	13.4 Ketersediaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (4 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
14.	Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu								
	14.1 Keberadaan sistem penjaminan mutu internal (unit sendiri atau melekat pada struktur organisasi) yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.	7	6	5	4	3	2	1	
	14.2 Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya.	7	6	5	4	3	2	1	
	14.3 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.	7	6	5	4	3	2	1	
	14.4 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (4 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
G.	Standar Pembiayaan								
15.	Pengelolaan Dana								
	15.1	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana	7	6	5	4	3	2	1
	15.2	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.	7	6	5	4	3	2	1
	15.3	Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.	7	6	5	4	3	2	1
	15.4	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	15.5	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.	7	6	5	4	3	2	1
	15.6	Kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	15.7	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	15.8	Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.	7	6	5	4	3	2	1
	15.9	Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (9 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
H.	Standar Penilaian								
16.	Evaluasi Hasil Belajar								
	16.1	Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	7	6	5	4	3	2	1
	16.2	Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.	7	6	5	4	3	2	1
	16.3	Kesesuaian Indikator-Indikator soal dengan <i>learning outcome</i> yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	7	6	5	4	3	2	1
	16.4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian.	7	6	5	4	3	2	1
	16.5	Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).	7	6	5	4	3	2	1
	16.6	Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (6 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
I.	Standar Penelitian							
17.	Capaian Penelitian							
17.1	Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	7	6	5	4	3	2	1
17.2	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal.	7	6	5	4	3	2	1
17.3	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal.	7	6	5	4	3	2	1
17.4	Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi.	7	6	5	4	3	2	1
17.5	Persentase publikasi buku per dosen.	7	6	5	4	3	2	1
17.6	Jumlah paten.	7	6	5	4	3	2	1
17.7	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.	7	6	5	4	3	2	1
17.8	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> .	7	6	5	4	3	2	1
17.9	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah.	7	6	5	4	3	2	1
17.10	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah.	7	6	5	4	3	2	1

	17.11 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi.	7	6	5	4	3	2	1
	17.12 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional, nasional, dan internal.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (12 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
J.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat								
18.	Capaian Pengabdian kepada Masyarakat								
	18.1 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1	
	18.2 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1	
	18.3 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1	
	18.4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.	7	6	5	4	3	2	1	
	18.5 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1	
	18.6 Persentase penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1	
	Rata-rata Skor (6 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan							
K.	Standar Kerjasama								
19.	Capaian Kerjasama								
	19.1	Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.	7	6	5	4	3	2	1
	19.2	Jumlah kerjasama/MoU.	7	6	5	4	3	2	1
	19.3	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan.	7	6	5	4	3	2	1
	19.4	Persentase aktivitas pertukaran dosen dalam kegiatan Tri Dharma.	7	6	5	4	3	2	1
	19.5	Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma.	7	6	5	4	3	2	1
	19.6	Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.	7	6	5	4	3	2	1
	19.7	Jumlah mahasiswa internasional.	7	6	5	4	3	2	1
		Rata-rata Skor (7 Indikator)							

Rangkuman Jumlah Indikator SPMI

No.	Standar	Jumlah Indikator
A	Standar Isi	5
B	Standar Proses	10
C	Standar Kompetensi Lulusan	10
D	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4
E	Standar Sarana dan Prasarana	10
F	Standar Pengelolaan	20
G	Standar Pembiayaan	9
H	Standar Penilaian	6
I	Standar Penelitian	12
J	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	6
K	Standar Kerjasama	7
Jumlah		99

RUBRIK ALAT EVALUASI MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI INDONESIA

Versi 1.2

oleh Tim Penyelaras Bidang Penjaminan Mutu Dikmendikti
--

A.**STANDAR ISI**

1. Kurikulum	
1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	
7	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 4 tahun.
6	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala lebih dari 4 tahun.
5	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak ada pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
4	Ada dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak ada peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
3	Ada kebijakan tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam dokumen formal.
2	Ada kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
1	Tidak ada kebijakan tertulis tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.
1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	
7	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah serta hasil <i>benchmark</i> di berbagai institusi lain.
6	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah.
5	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni.
4	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.

3	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen saja.
2	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi saja.
1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja.
1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	
7	Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
6	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
5	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis serta evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis dan dievaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti.
4	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen pengembangan kurikulum program studi tetapi tidak dianalisis, dievaluasi, juga tidak ditindaklanjuti.
3	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen namun tidak lengkap sebagai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.
2	Ada rencana penyusunan pedoman dan dokumen implementasi monitoring serta keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.
1	Tidak ada pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum.
1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	
7	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi termasuk <i>soft skills</i> , visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
6	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
5	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis.
4	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap.
3	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi namun tidak lengkap.
2	Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi.

1	Tidak ada kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi institusi.
1.5	Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.
7	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
6	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala.
5	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada mekanisme penyesuaian kurikulum.
4	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, namun tidak lengkap.
3	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
1	Ada dokumen kurikulum tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

B.**STANDAR PROSES**

2. Pengembangan Mutu Pembelajaran	
2.1	Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
7	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.
6	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam dan luar negeri.
5	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri.
4	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
3	Ada unit yang mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
2	Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.
1	Tidak memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.
2.2	Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.
7	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala.
6	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar

	minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dengan baik.
5	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi baik.
4	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten dan dimonitor dengan baik tetapi tidak dievaluasi.
3	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan dan pelaksanaannya konsisten tetapi tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
2	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan <i>tetapi</i> pelaksanaannya tidak konsisten, tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
1	Tidak ada sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik.
2.3	Kejelasan pedoman pelaksanaan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
7	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit dan ditingkatkan terus-menerus.
6	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.

5	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di sebagian unit.
4	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun pelaksanaannya masih belum konsisten di seluruh unit.
3	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak lengkap dan tidak diintegrasikan.
1	Tidak memiliki pedoman pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.	
7	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit dengan evaluasi secara berkala.
6	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada tetapi tidak dievaluasi secara berkala.
5	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian besar (70-99%) unit yang ada.
4	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian (35-69%) unit yang ada.
3	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian kecil (<35%) unit yang ada.
2	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran tetapi belum diimplementasikan.
1	Belum ada penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran.

2.5	Penerapan (metode pembelajaran yang mempergunakan) pendekatan <i>student-centered learning</i>.
7	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 100% <i>student centered learning</i> yang dilakukan di seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
6	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 75-99% <i>student centered learning</i> yang dilakukan di seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
5	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 50-74% <i>student centered learning</i> yang dilakukan di seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
4	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 30-49% <i>student centered learning</i> yang dilakukan di seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
3	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan <30% <i>student centered learning</i> yang dilakukan di seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
2	Belum menerapkan metode pembelajaran dengan pendekatan <i>student centered learning</i> .
1	Belum ada metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
2.6	Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.
7	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri serta telah menghasilkan penciptaan pengetahuan baru.
6	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.
5	Ada program intergrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain di dalam negeri.
4	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma dan sudah diimplementasikan secara rutin pada internal perguruan tinggi.
3	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma

	namun diimplementasikan belum secara rutin pada internal perguruan tinggi.
2	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma namun belum diimplementasikan pada internal perguruan tinggi.
1	Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma
2.7	Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri.
7	Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri terprogram.
6	Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi tidak terprogram.
5	Setiap tahun ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
4	Dalam 2 tahun terakhir ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
3	Ada rencana pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
2	Ada rencana pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran dari dalam negeri.
1	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri.

3. Suasana Akademik	
3.1 Kejelasan dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	
7	Ada dokumen formal yang lengkap dan diperbaharui secara berkala mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
6	Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
5	Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit.
4	Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit.
3	Ada dokumen formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
2	Ada dokumen formal yang tidak lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
1	Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
3.2 Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	
7	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang dievaluasi secara berkala dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di seluruh unit.
6	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian besar unit.
5	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya,

	monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian kecil unit.
4	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
3	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
2	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
1	Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
3.3 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat seni dan budaya bagi mahasiswa.	
7	PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa yang aktif dengan aktivitas rutin dan ada reputasi di level nasional dan internasional.
6	PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin dan ada reputasi nasional.
5	PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin belum ada reputasi nasional.
4	PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas yang belum rutin.
3	PT mempunyai pusat seni dan budaya bagi mahasiswa tetapi tidak ada aktivitas.
2	PT baru merencanakan pengembangan pusat seni dan budaya.
1	PT belum merencanakan pengembangan pusat seni dan budaya.

C.**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

4. Kelulusan Mahasiswa	
4.1	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi.
7	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi <5%.
6	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 5-<10%.
5	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 10-<15%.
4	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 15-<20%.
3	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 20-<25%.
2	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 25-30%.
1	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi > 30%.
4.2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.
7	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50%.
6	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 40%-50%.
5	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 30-<40%.
4	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 20-<30%.
3	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 10-<20%.
2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi <10%.
1	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 0%.
4.3	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
7	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4 tahun (S1) atau 3 tahun (D3).
6	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,0-<4,5 tahun (S1) atau 3-<3,7 tahun (D3).
5	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,5-<5,0 tahun (S1)

	atau 3,7-<4,0 tahun (D3).
4	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,0-<5,5 tahun (S1) atau 4,0-<4,3 tahun (D3).
3	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,5-<6,0 tahun (S1) atau 4,3-<4,6 tahun (D3).
2	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 6,0-<6,5 tahun (S1) atau 4,6-<5,0 tahun (D3).
1	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir ≥ 7 tahun.
4.4	Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.
7	Sistem evaluasi yang efektif yang mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
6	Sistem evaluasi yang parsial yang mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
5	Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup tiga di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4	Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup dua di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3	Sistem evaluasinya hanya parsial atau hanya mencakup satu di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sahih dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

2	PT sedang menyusun sistem evaluasi lulusan yang efektif.
1	Belum adanya sistem evaluasi lulusan yang efektif.
4.5	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.
7	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan >50%.
6	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 40-<50%.
5	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 30-<40%.
4	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 25-<30%.
3	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 20-<25%.
2	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 10-<20%.
1	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan <10%.
4.6	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
7	>25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
6	20-25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
5	15-<20% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
4	10-<15% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan s sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran.
3	5-<10% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
2	Kurang dari 5 % dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
1	Belum ada alumni memberikan partisipasi dalam memberikan dana alumni dan bersifat monumental.

4.7	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama.
7	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama <3 bulan.
6	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama 3-6 bulan.
5	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan hingga 9 bulan.
4	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 9 bulan hingga 12 bulan.
3	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 12 bulan hingga 15 bulan.
2	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 15 bulan hingga 18 bulan.
1	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama >18 bulan.
4.8	Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreneur</i> dalam tiga tahun terakhir.
7	> 25 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> yang berhasil.
6	20-25 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> yang berhasil.
5	15-<20 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
4	10-<15 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
3	5-<10 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
2	3-<5 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .
1	<3 % dari lulusan PT menjadi <i>entrepreneur</i> .

5. Prestasi Mahasiswa	
5.1 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional.	
7	>5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
6	3-5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
5	<3% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
4	>10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
3	5-10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
2	<5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
1	Tidak ada mahasiswa yang meraih prestasi baik di tingkat internasional, nasional, maupun propinsi/wilayah.
5.2 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	
7	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram yang keberlanjutan.
6	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram.
5	Dua dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, penyediaan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram, tetapi satu di antaranya bersifat parsial.
4	Satu dari tiga upaya berikut bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten.
3	Satu dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram, tetapi belum konsisten.
2	Ada upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi tetapi tidak terprogram.
1	Belum ada upaya untuk memberi bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dan.

D.**STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

6. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
6.1 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan.	
7	1:<31 (eksakta) atau 1:<100 (sosial).
6	1:30-35 (eksakta) atau 1:100-125(sosial).
5	1:35-40 (eksakta) atau 1:125-150(sosial).
4	1:40-45 (eksakta) atau 1:150-175(sosial).
3	1:45-50(eksakta) atau 1:175-200(sosial).
2	1:50-55(eksakta) atau 1:200-225 (sosial).
1	1:> 55 (eksakta) atau 1:>225 (sosial).
6.2 Ketersediaan tenaga kependidikan.	
7	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100.
6	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:100-150.
5	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:150-200.
4	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:200-250.
3	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:250-300.
2	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:300-350.
1	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:>350.
6.3 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
7	PT memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten pada standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
6	PT memiliki 6 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
5	PT memiliki 5 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.

3	PT memiliki upaya pengembangan tenaga dosen tetap dan tenaga kependidikan dan cukup baik, namun dukungan dana dari pihak institusi masih kurang, sehingga kurang memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
2	PT memiliki upaya dan komitmen institusi dalam pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dan, tidak ada dukungan dana.
1	PT belum memiliki upaya pengembangan, padahal jumlah dosen dan tenaga kependidikan masih belum memadai.
6.4	Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
7	PT memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
6	PT memiliki 2 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
5	PT memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti belum dilaksanakan secara konsisten.
3	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.
2	PT memiliki pedoman tertulis, tidak lengkap dan belum dilaksanakan.
1	PT belum memiliki dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi.

E.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
7.1	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.
7	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka berikut: (A) Buku teks dan perlengkapannya, (B) Skripsi, tesis, disertasi, (C) Jurnal nasional belum terakreditasi, (D) Jurnal nasional terakreditasi, (E) Prosiding nasional/internasional (F) Jurnal internasional dengan sangat memadai untuk semua program studi.
6	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, E, dan F memadai untuk sebagian besar program studi.
5	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, dan E dengan memadai untuk sebagian besar program studi.
4	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, dan D dengan memadai untuk sebagian besar program studi.
3	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, dan C dengan memadai untuk seluruh program studi.
2	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A dan B untuk sebagian besar program studi.
1	Tersedia koleksi perpustakaan, tetapi belum menggunakan <i>e-library</i> .
7.2	Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i>, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.
7	Ketersediaan dan akses penggunaan sarana dan prasarana “sangat memadai” (>75%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
6	Ketersediaan dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 75%) penggunaan mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
5	Ketersediaan dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
4	Ketersediaan dan akses penggunaan “belum memadai” (< 25%) mencakup: A.

	Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
3	Ketersediaan dan akses penggunaan “ kurang memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya
2	Ketersediaan dan akses penggunaan “ memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, dan C. Ruang simulasi
1	Ketersediaan dan akses penggunaan “ kurang memadai” (sampai dengan 25%) mencakup: A. Tempat praktikum dan B. Bengkel/Studio
7.3	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, <i>green area</i>, fasilitas <i>difable</i> dan ruang bimbingan dan konseling.
7	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana mencakup: 1. ruang serba guna, 2. tempat olah raga, 3. ruang himpunan mahasiswa, 4. poliklinik, 5. ruang ibadah/doa, 6. <i>green area</i> , 7. fasilitas <i>difable</i> , 8. ruang bimbingan dan konseling, dan 9. lainnya.
6	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 7-8 dari 9.
5	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 5-6 dari 9.
4	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 4 dari 9.
3	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 3 dari 9.
2	Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 1-2 dari 9.
1	Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti daftar di atas.
8.	Ketersediaan Sistem Informasi
8.1	Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk <i>band width</i>, <i>hardware</i>, <i>software</i>, <i>e-learning</i>, dan <i>on-line journal/library</i>.
7	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
6	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 3 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
5	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 2 dari keempat

	fasilitas TIK yang dimaksudkan.
4	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 1 dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
3	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width</i> dan <i>hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
2	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
1	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width hardware</i> , 2. <i>software</i> , dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
8.2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup <i>hardware</i> dan <i>software</i>.
7	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik, 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan, 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.
6	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 5 di antara 6 dari daftar.
5	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 4 di antara 6 dari daftar.
4	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 3 di antara 6 dari daftar.
3	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 2 di antara 6 dari daftar.
2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 1 di antara 6 dari daftar.
1	Sistem informasi dalam administrasi belum satupun digunakan dan belum ada rencana pengembangan.
8.3	Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai
7	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> > 25 kbps per mahasiswa
6	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 15 - 25 kbps per mahasiswa
5	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 5 - <15 kbps per mahasiswa
4	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 1 - <5 kbps per mahasiswa
3	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 0,5 - <1 kbps per mahasiswa
2	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> <0,5 kbps per mahasiswa
1	Belum ada fasilitas internet
8.4	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
7	Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.
6	Data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui

	jaringan internet.
5	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas internet (<i>Wide Area Network</i> , WAN).
4	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (<i>Local Area Network</i> , LAN).
3	Data dikelola dengan komputer tanpa aringa.
2	Data dikelola secara manual.
1	Belum ada penanganan data.
8.5	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
7	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang sangat memadai.
6	<i>Blue print</i> pengembangan dan pengelolaan sangat lengkap, dan pemanfaatan sistem informasi, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang memadai.
5	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.
4	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat, namun masih terbatas dengan pendanaan.
3	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini.
2	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. belum jelas.
1	Belum tersedia <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.

F.**STANDAR PENGELOLAAN**

9. Tata Pamong	
9.1	Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan implementasi secara konsisten.
7	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 8 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
6	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
5	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 6 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
4	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 5 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.

3	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 4 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
2	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 3 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
1	PT belum memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi.

10. Kepemimpinan	
10.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.	
7	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, serta ada bukti efektivitas kepemimpinan.
6	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
5	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga dari tiga karakteristik berikut, , yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik tidak memiliki pedoman, tetapi ada bukti efektivitas kepemimpinan.
4	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.
3	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
2	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.
1	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
10.2 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT.	
7	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan dan bukti berupa dokumen pengelolaan.
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman

	pengelolaan, tetapi tanpa bukti berupa dokumen pengelolaan.
5	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengelolaan.
4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti dokumen pengelolaan.
3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi dilengkapi oleh ada bukti dokumen pengelolaan.
2	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan.
1	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup dua dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti dokumen pengelolaan.

11. Sistem Pengelolaan	
11.1 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.	
7	Perguruan tinggi memiliki (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
6	Perguruan tinggi memiliki 4 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
5	Perguruan tinggi memiliki 3 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
4	Perguruan tinggi memiliki 2 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
3	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
2	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu (1) rancangan dan analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang belum menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif.

11.2 Diseminasi hasil kerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	
7	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tahun.
6	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tiga tahun.
5	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap lima tahun.
4	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal setiap tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
3	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal tiga tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
2	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal <i>stakeholders</i> , tetapi tidak dilakukan secara berkala.
1	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada <i>stakeholders</i> .

12.	Seleksi Mahasiswa Baru
12.1	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan atas dasar apa pun juga.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa serta kemampuan finansial orang tua mahasiswa.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa dan etnis.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa, etnis serta kepercayaan mahasiswa.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup.
12.2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari mana pun asalnya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing dari ASEAN serta LUAR ASEAN.
4	Sistem Penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah NKRI.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari pulau tempat perguruan tinggi berada.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari propinsi tempat perguruan tinggi berada.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari daerah.

	tempat perguruan tinggi berada.
12.3	Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang jelas.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang fleksible.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrument sitem pengambilan keputusan yang tidak jelas.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, tanpa prosedur dan instrumen sistem pengambilan keputusan.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang bergantung pada kebijakan pimpinan.
1	Keputusan penerimaan mahasiswa baru tanpa prosedur yang jelas.
12.4	Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.
7	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa.
6	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pengaturan finansial yang sudah diatur sistem subsidi dan beasiswa.
5	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang diatur sistem subsidi dan pinjaman.
4	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial karena sudah diatur sistem subsidi.
3	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat

	mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka panjang.
2	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka pendek.
1	Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan finansial tertentu dapat diterima.
12.5	Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.
7	Kurang 10 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
6	10-20 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
5	20-<40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
4	40-<60 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
3	60-<80% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
2	80-<100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
1	100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
12.6	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.
7	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi >95%.
6	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 80-95%.
5	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 70-<80%.
4	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 60-<70%.
3	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 50-<60%.
2	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 40-<50%.
1	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi <40%.
12.7	Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.
7	Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
6	10-20 % mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
5	20-<40 % mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari

	perguruan tinggi lain.
4	40-<60 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
3	60-80 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
2	80-<100 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
1	100 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.

13. Kualitas Layanan kepada Mahasiswa	
13.1 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	
7	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) proses perkuliahan; (2) perpustakaan; (3) olah raga/beladiri; (4) seni; (5) kesehatan; (6) lainnya yang dilaksanakan secara berkala setiap semester untuk butir (1) dan tahunan untuk (2) – (6).
6	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 4 hal di antara (2) – (6).
5	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 3 hal diantara (2) – (6).
4	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan untuk 3 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
3	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
2	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sahih, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan secara tidak berkala/teratur.
1	Belum memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
13.2 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	
7	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
6	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat,

	disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, namun tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
5	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
4	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, tetapi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak dianalisis dengan metode yang tepat, dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan tetapi tidak dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
1	Belum ditemukan laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.
13.3	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft skills</i>, beasiswa, dan kesehatan.
7	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
6	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>4 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
5	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>3 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
4	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>2 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
3	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>1 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan

	(5) kesehatan.
2	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam <u>1 dari 5</u> aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan <i>soft skills</i> , (4) beasiswa dan (5) kesehatan namun kurang representatif.
1	Tidak ada layanan kepada mahasiswa.
13.4	Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
7	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
6	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>4 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
5	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>3 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
4	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>2 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
3	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup <u>1 dari 5</u> aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
2	PT sedang mengembangkan dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan
1	PT belum memiliki dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.

14. Sistem Penjaminan Mutu	
14.1	Keberadaan sistem penjaminan mutu internal (unit sendiri atau melekat pada struktur organisasi) yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.
7	PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu , yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.
6	PT memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaannya.
5	PT memiliki Manual Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi tidak ada bukti-bukti dokumen pelaksanaannya.
4	PT memiliki Manual Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen dan tidak ada bukti dokumen pelaksanaannya.
3	PT memiliki hanya memiliki 5 dari 7 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu
2	PT memiliki hanya memiliki 3 dari 7 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu
1	PT memiliki memiliki kurang dari 3 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu.
14.2	Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya.
7	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan

	disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.
6	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, tetapi tidak ditindaklanjuti.
5	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.
4	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.
3	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi tetapi tidak disosialisasikan dengan baik.
2	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum tersedianya hasil monitoring sasaran penjaminan mutu.
14.3	Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.
7	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan kepada semua <i>stakeholders</i> .
6	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan didiseminasikan terbatas secara internal.
5	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didiseminasikan.
4	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didiseminasikan.
3	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, tetapi belum digunakan untuk mengukur kinerja tiap unit.
2	Perguruan tinggi memiliki kriteria kinerja setiap unit kerja tetapi tidak memiliki instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.

14.4	Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya.
7	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
6	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif.
5	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>5 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
4	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>4 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
3	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>3 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
2	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>2 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
1	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai <u>1 dari 6</u> di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.

G.**STANDAR PEMBIAYAAN**

15. Pengelolaan Dana	
15.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana.	
7	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja.
6	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di sebagian unit kerja.
5	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, belum dilaksanakan secara konsisten.
4	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa belum jelas dan lengkap, serta belum dilaksanakan.
3	Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana, tetapi belum ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan.
2	Sedang dikembangkan dokumen kebijakan pengelolaan dana, ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan ada dokumen lelang pekerjaan barang atau jasa.
1	Tidak ada dokumen kebijakan pengelolaan dana.
15.2 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/ usaha/ ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.	
7	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya >20% dari total pembiayaan pendidikan.
6	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 15-20% dari total pembiayaan pendidikan.
5	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 10-<15% dari total pembiayaan pendidikan.

4	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 5-<10% dari total pembiayaan pendidikan.
3	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 3%-<5% dari total pembiayaan pendidikan.
2	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya <3% dari total pembiayaan pendidikan.
1	Tidak ada sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya.
15.3	Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
7	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa.
6	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan orang tua mahasiswa.
5	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan dan dosen.
4	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan dan dosen dilakukan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
3	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
2	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan tetapi dilakukan secara tidak transparans dan tidak akuntabel.
1	Tidak ada pedoman.
15.4	Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.
7	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa.
6	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan, dan orang tua mahasiswa.
5	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa yang melibatkan unsur pimpinan saja.
4	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa tetapi tidak melibatkan unsur pimpinan.

3	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan.
2	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan pembiayaan mahasiswa dan tidak melibatkan unsur mana pun.
1	Tidak ada pedoman.
15.5	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.
7	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan <50%.
6	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 50-60%.
5	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 61-70%.
4	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 71-80%.
3	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 81-90%.
2	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 91-99%.
1	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 100%.
15.6	Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
7	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, unsur dosen, unsur orang tua mahasiswa dan unsur mahasiswa
6	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, unsur dosen, dan unsur orang tua mahasiswa.
5	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan unsur pimpinan, dan unsur dosen.
4	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, dan melibatkan unsur pimpinan
3	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, dan ada mekanisme rapat yang transparan tetapi tidak melibatkan pihak manapun.
2	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa tetapi tidak jelas.

1	Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
15.7	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.
7	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 75-90% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
6	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 67,5-< 75% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
5	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 50-< 67,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
4	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 35-< 50% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
3	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 22,5-< 35% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
2	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 10 -< 22,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
1	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar < 10% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
15.8	Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
7	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti pelaksanaan monitoring dan (4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan internal yang lengkap.
6	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, dan (3) bukti pelaksanaan monitoring.
5	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, dan (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (3) bukti pelaksanaan tidak lengkap.
4	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada evaluasi pendanaan internal.
3	Ada (1) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada monitoring pendanaan internal.

2	Ada standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, atau ada standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal tetapi bukti pelaksanaan tidak lengkap.
1	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
15.9	Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal (akuntan publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
6	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, dan ada evaluasi audit eksternal (akuntan publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebagian pemangku kepentingan
5	Ada laporan keuangan yang transparan tetapi hanya dilakukan audit internal.
4	Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal.
3	Hanya ada evaluasi audit internal.
2	Laporan keuangan tidak transparan.
1	Tidak ada laporan keuangan.

H.

STANDAR PENILAIAN

16. Evaluasi Hasil Belajar	
16.1 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	
7	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, selalu ditinjau secara berkala, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
6	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, ditinjau secara insidental, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
5	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
4	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan selalu ditinjau secara berkala.
3	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara insidental.
2	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan tetapi tidak pernah ditinjau.
1	Sistem evaluasi hasil belajar yang telah diterapkan belum sesuai dengan ranah kompetensi lulusan
16.2 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.	
7	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap tiga tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> .
6	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap lima tahun dan dilaksanakan tetapi belum melibatkan <i>stakeholder</i> .
5	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan secara periodik setiap sepuluh tahun dengan melibatkan dan <i>stakeholder</i> .
4	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap tiga tahun dan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
3	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara

	periodik setiap lima tahun dan dilaksanakan tanpa melibatkan <i>stakeholder</i> .
2	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap sepuluh tahun dan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
1	Sistem evaluasi yang diterapkan belum sesuai dengan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.
16.3	Kesesuaian butir-butir soal dengan <i>luaran pembelajaran</i> yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.
7	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran (learning outcome)</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik setiap tahun.
6	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
5	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap lima tahun.
4	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap sepuluh tahun.
3	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> tetapi belum didasarkan atas isi silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
2	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi belum sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
1	Butir-butir soal belum dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi dan belum disesuaikan dengan <i>luaran pembelajaran</i> .
16.4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian.
7	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap tahun.
6	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap semester.
5	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap dua tahun.

4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semester dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
3	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semtaahun dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
2	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap dua tahun tetapi dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
1	Tidak ada <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester).
16.5	Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap lima tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tujuh tahun.
4	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
3	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
2	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) dan tidak pernah direview oleh tim.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).
16.6	Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap lima tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap dua belas tahun.
4	PT memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap lima tahun.

3	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
2	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap lima tahun.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai.

I.

STANDAR PENELITIAN

17. Capaian Penelitian	
17.1 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	
7	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar implementasi, monitoring, dan evaluasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
6	Ada pedoman yang jelas dan namun belum lengkap tentang kebijakan dasar implementasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
5	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (3 aspek).
4	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (2 aspek).
3	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (1 aspek).
2	Sedang dikembangkan pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
1	Belum ada pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
17.2 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional sebanyak >40%.
6	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 20-40%.
5	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 10-<20%.

4	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional <10%, nasional >40%.
3	Ada dosen yang menjalankan penelitian tingkat nasional, dengan persentase <40%.
2	Sudah ada dosen yang menjalankan penelitian internal.
1	Belum ada dosen yang menjalankan penelitian.
17.3 Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir.	
7	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional sebanyak >25% dari total dana penelitian.
6	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional 10- 25% dari total dana penelitian.
5	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak > 25% dari total dana penelitian.
4	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional 10- 25% dari total dana penelitian.
3	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal sebanyak $\geq$ 25% dari total dana penelitian.
2	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal di bawah <25% dari total dana penelitian.
1	Belum ada besaran dan proporsi dana penelitian atau <i>funding</i> yang diperoleh.
17.4 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >25%.
6	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 15-25%.
5	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 5-<15%.
4	Persentase publikasi artikel ilmiah antara 30-50% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
3	Persentase publikasi artikel ilmiah di atas 10-<30% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
2	Persentase publikasi artikel ilmiah <10% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
1	Belum ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional.
17.5 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit internasional
6	Persentase publikasi buku 15-25% diterbitkan oleh penerbit internasional.
5	Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional.
4	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit nasional.
3	Persentase publikasi buku 10-25% diterbitkan oleh penerbit nasional.

2	Persentase publikasi buku <10% diterbitkan oleh penerbit nasional.
1	Belum ada buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
17.6 Jumlah paten.	
7	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> > 50, dan ada yang telah dikomersialisasikan.
6	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 25-50.
5	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 15-<25.
4	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 10-<15.
3	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> <10.
2	Jumlah paten yang telah didaftarkan kurang dari 50, belum ada yang dikabulkan/ <i>granted</i> .
1	Belum ada paten yang didaftarkan untuk diajukan paten.
17.7 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.	
7	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional sebanyak > 25%.
6	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 15-25%.
5	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 5-<15%.
4	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional >25%.
3	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional 10-25%.
2	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional <10%.
1	Belum ada prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.
17.8 Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional >10%.

3	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional <5%.
1	Belum ada dosen yang menjadi <i>invited speaker</i> di tingkat internasional maupun nasional.
17.9	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional >25%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 15-25%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 5-<15%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional >25%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional 10-25%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional <10%.
1	Belum ada dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional.
17.10	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional >50%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 40-50%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 30-<40%
4	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional >50%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 40-50%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 30-<40%.
1	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional <30%.

17.11	Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi per tahun.
7	Jumlah pertemuan ilmiah internasional sebanyak >10.
6	Jumlah pertemuan ilmiah internasional 5-10.
5	Jumlah pertemuan ilmiah internasional <5.
4	Jumlah pertemuan ilmiah nasional >50.
3	Jumlah pertemuan ilmiah nasional 20-50.
2	Jumlah pertemuan ilmiah nasional <20.
1	Belum ada pertemuan ilmiah internasional dan nasional.
17.12	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional, nasional, dan internal tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10%.
3	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional <5%.
1	Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan internasional.

J.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

18. Capaian Pengabdian kepada Masyarakat	
18.1 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat	
7	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja, belum secara konsisten.
2	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.
18.2 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
7	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja secara konsisten.
6	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten.
4	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
3	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku namun belum dilaksanakan.
2	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang belum baku.
1	Tidak adanya pedoman pengelolaan pengabdian masyarakat.
18.3 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	
7	>50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
6	40-50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
5	30-<40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

4	20-<30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
3	10-<20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2	5-<10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
1	<5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
18.4	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian tiga tahun terakhir.
7	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian >50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian mencapai 40-50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 30-<40% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 20-<30% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 10-<20% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <10% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum ada pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.
18.5	Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.
7	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat >30%.
6	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 20-30%.
5	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 15-<20%.
4	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 10-<15%.
3	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 5-10%.
2	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat <5%.
1	Tidak ada persentase dana yang diperoleh dipergunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
18.6	Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat.
7	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
6	Institusi 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.

5	Institusi <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
4	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
3	Institusi memiliki 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
2	Institusi memiliki <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
1	Belum pernah memperoleh penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat.

K.**STANDAR KERJASAMA**

19. Capaian Kerjasama	
19.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.	
7	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja belum secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja belum secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas tetapi belum dilaksanakan.
2	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama belum lengkap dan jelas dan belum dilaksanakan.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dan pengelolaan oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerja sama.
19.2 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir.	
7	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
6	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.

5	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
4	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
3	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan $\geq 80\%$ di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
2	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
1	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan kurang dari 50% di antaranya telah ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
19.3	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional $>30\%$.
6	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional 20-30%.
5	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional $<20\%$.
4	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional $>30\%$.
3	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 20-30%.
2	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 10- $<20\%$.
1	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional $<10\%$.
19.4	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.
7	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma $> 30\%$, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 25-30%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 20- $<25\%$, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri

	Dharma antara 15-<20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
1	Belum ada dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.5	Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.
7	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma >20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15-20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 5-<10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma kurang dari 5%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 5%, belum ada di tingkat internasional.
1	Belum ada mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.6	Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.
7	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
6	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
5	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
4	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
3	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
1	Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.
19.7	Jumlah mahasiswa internasional
7	>500
6	401-500

5	301-400
4	201-300
3	101-200
2	<100.
1	Belum ada mahasiswa internasional.

**PEDOMAN
PEMANFAATAN DATA
EVALUASI MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI INDONESIA**

Versi 1.1

A. Penentuan Bobot Standar dan Bobot Komponen

Alat Evaluasi Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia terdiri dari 11 standar yang di dalamnya terdapat 19 komponen. Bobot standar sudah ditentukan berdasarkan kompromi para pakar dan praktisi pendidikan; sedangkan bobot komponen ditentukan dari besar bobot standar dibagi dengan jumlah komponen. Adapun besarnya bobot standar dan bobot komponen adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Bobot Standar dan Bobot Komponen Alat Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia

NO	STANDAR	NOMOR KOM-PONEN	JUMLAH KOM-PONEN	BOBOT STANDAR	BOBOT KOM-PONEN
1	Isi	1	1	10	10,00
2	Proses	2-3	2	12	6,00
3	Kompetens Lulusan	4-5	2	10	5,00
4	Pendidik dan Tendik	6	1	12	12,00
5	Sarana Prasarana	7-8	2	10	5,00
6	Pengelolaan	9-14	6	8	1,33
7	Pembiayaan	15	1	6	6,00
8	Penilaian	16	1	8	8,00
9	Penelitian	17	1	12	12,00
10	Pengabdian Masyarakat	18	1	6	6,00
11	Kerja Sama	19	1	6	6,00

Catatan: *Bobot Indikator = Bobot Standar: Jumlah Indikator*

B. Penentuan Skor Rata-Rata Komponen

Setiap komponen terdiri dari satu atau lebih indikator. Skor Rata-rata Komponen diperoleh dari jumlah skor indikator dibagi jumlah indikator. Sebagai contoh Komponen Kurikulum terdiri dari 5 indikator; masing-masing adalah Indikator 1 bernilai 4, Indikator 2 bernilai 2, Indikator 3 bernilai 3, Indikator 4 bernilai 7, dan

Indikator 5 bernilai 7. Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum adalah $4 + 2 + 3 + 7 + 7$ dibagi 5 sama dengan 4,60 dan dibulatkan menjadi 5.

Tabel 2: Perhitungan Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum

NO	KOMPONEN DAN INDIKATOR	SKOR INDIKATOR						
1	Kurikulum							
	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	Skor Rata-rata (5 Indikator)	5						

C. Penentuan Skor Indikator dan Skor Maksimal Standar

Seluruh indikator instrumen SPMI PT berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan nilai 1 s/d 7. Jika perolehan nilai rata-rata maksimal setiap komponen adalah 7 maka skor maksimal standar dapat dihitung dengan rumus:

Skor Maksimal Standar = Jumlah Komponen x Skor Rata-rata
Komponen x Bobot Komponen

Skor maksimal pada setiap standar seperti terlihat pada Tabel 3 Kolom 5 berikut ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah nilai Maksimal Standar sama dengan 700.

**Tabel 3: Perhitungan Skor Maksimal Standar Alat Evaluasi Mutu Internal
Perguruan Tinggi Indonesia**

NO	STANDAR	JUMLAH KOM- PONEN	SKOR RATA2 MAKS STANDAR	BOBOT KOM- PONEN	SKOR MAKS STANDAR
1	Isi	1	7	10,00	70
2	Proses	2	7	6,00	84
3	Kompetensi Lulusan	2	7	5,00	70
4	Diktendik	1	7	12,00	84
5	Sarana Prasarana	2	7	5,00	70
6	Pengelolaan	6	7	1,33	56
7	Pembiayaan	1	7	6,00	42
8	Penilaian	1	7	8,00	56
9	Penelitian	1	7	12,00	84
10	Pengabdian pada Masyarakat	1	7	6,00	42
11	Kerja Sama	1	7	6,00	42
	Jumlah Skor Maksimal Standar				700

D. Penentuan Nilai Komprehensif

Langkah-langkah penentuan Nilai Komprehensif adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada masing-masing standar. Sebagai contoh Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Jumlah Skor Rata-Rata Komponen Standar Proses

NO	KOMPONEN	SKOR RATA-RATA
2	Pengembangan mutu pembelajaran	6
3	Suasana akademik	5
Jumlah Skor Rata-rata Komponen		11

Dari Tabel 4 tersebut terlihat bahwa Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah 11. Selanjutnya masukkan skor rata-rata 11 ini ke dalam Tabel 5, Kolom 3, Nomor 2.

2. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 3, dari Nomor 1 s/d 11.
3. Menghitung Nilai Tertimbang untuk setiap standar dengan rumus:

Nilai Tertimbang setiap Standar = Jumlah Rata-rata Skor Komponen dikalikan Bobot Komponen.

Sebagai contoh:

$$\text{Nilai Tertimbang Standar Proses} = 11 \times 6,00 = 66,00$$

Selanjutnya masukkan Nilai Tertimbang Standar Proses tersebut ke dalam Tabel 5, Kolom 5, Nomor 2.

4. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 3 tersebut untuk semua (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.
5. Menjumlahkan Nilai Tertimbang untuk seluruh standar mulai dari Standar 1 (Standar Isi) s/d Standar 11 (Standar Kerja Sama).

Sebagai contoh: Jumlah Nilai Tertimbang dari seluruh standar mutu PT sama dengan 450,57 (Lihat Tabel 5, Kolom 5, Nomor 12).

6. Menentukan Nilai Komprehensif dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{700} \times 100$$

Kalau Jumlah Nilai Tertimbang sama dengan maka:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{450,57}{700} \times 100 = 64,37$$

Dibulatkan menjadi 64

Jadi Nilai Komprehensif PT yang bersangkutan adalah 64

Tabel 5: Perhitungan Nilai Komprehensif Perguruan Tinggi

NO	STANDAR	JUMLAH RATA-RATA SKOR KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN	NILAI TERTIMBANG
1	Isi	6	10,00	60,00
2	Proses	11	6,00	66,00
3	Kompetensi Lulusan	10	5,00	50,00
4	Pendidik dan Tendik	4	12,00	48,00
5	Sarana dan Prasarana	10	5,00	50,00
6	Pengelolaan	29	1,33	38,57
7	Pembiayaan	3	6,00	18,00
8	Penilaian	3	8,00	24,00
9	Penelitian	4	12,00	48,00
10	Pengabdian kepada Masyarakat	2	6,00	12,00
11	Kerja Sama	6	6,00	36,00
12	Jumlah Nilai Tertimbang			450,57
13	Nilai Komp = Jumlah Nilai Tertimbang : 700 x 100			64

E. Penentuan Nilai Standar

Nilai mutu standar merupakan nilai persentase capaian untuk setiap standar mutu. Langkah-langkah untuk menentukan Nilai Standar adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Standar dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Standar} = \frac{\text{Nilai Tertimbang}}{\text{Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

Sebagai contoh,

$$\text{Nilai Tertimbang Standar Isi} \\ \text{Nilai Standar Isi} = \frac{\text{Skor Maksimal Standar Isi}}{\text{Skor Maksimal Standar Isi}} \times 100$$

$$\text{Nilai Standar Isi} = \frac{60}{70} \times 100 = 85,71$$

Dibulatkan menjadi 86.

Selanjutnya masukkan Nilai Standar Isi tersebut ke dalam Tabel 6, Kolom 5, Nomor 1.

- Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 6, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.

Tabel 6: Perhitungan Nilai Standar Perguruan Tinggi

NO	STANDAR	SKOR MAKSIMAL STANDAR	NILAI	
			TERTIMBANG	STANDAR
1	Isi	70	60,00	86
2	Proses	84	66,00	79
3	Kompetensi Lulusan	70	50,00	71
4	Pendidik dan Tendik	84	48,00	57
5	Sarana dan Prasarana	70	50,00	71
6	Pengelolaan	56	38,57	69
7	Pembiayaan	42	18,00	43
8	Penilaian	56	24,00	43
9	Penelitian	84	48,00	57
10	Pengabdian kepada Masyarakat	42	12,00	29
11	Kerja Sama	42	36,00	86

F. Kesimpulan

1. Konversi Tujuh Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka ke tujuh tahapan penjaminan mutu; yaitu 0 s/d 14 = Perbaikan Mendesak; 15 s/d 28 = Perbaikan Mayor; 29 s/d 42 = Perbaikan Minor; 43 s/d 57 = Kurang; 58 s/d 71 = Cukup; 72 s/d 85 = Baik; dan 86 s/d 100 = Sangat Baik; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 7: Hasil Pencapaian Mutu Internal Pt Dalam Skala Tujuh Tahapan

NO	STANDAR	NILAI	TAHAPAN
1	Isi	86	Sangat Baik
2	Proses	79	Baik
3	Kompetensi Lulusan	71	Cukup
4	Pendidik dan Tendik	57	Kurang
5	Sarana dan Prasarana	71	Cukup
6	Pengelolaan	69	Cukup
7	Pembiayaan	43	Kurang
8	Penilaian	43	Kurang
9	Penelitian	57	Kurang
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perbaikan Minor
11	Kerja Sama	86	Sangat Baik
Komprehensif		64	Cukup

2. Konversi Empat Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka empat tahapan penjaminan mutu, 86 s/d 100 = Contoh Baik; 71 s/d 85 = Baik; 56 s/d 70 = Cukup; 0 s/d 55 = Perlu Perbaikan; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 8: Hasil Pencapaian Mutu Internal Pt Dalam Skala Empat Tahapan

NO	STANDAR	NILAI	TAHAPAN
1	Isi	86	Contoh Baik
2	Proses	79	Baik
3	Kompetensi Lulusan	71	Baik
4	Pendidik dan Tendik	57	Cukup
5	Sarana dan Prasarana	71	Baik
6	Pengelolaan	69	Cukup
7	Pembiayaan	43	Perlu Perbaikan
8	Penilaian	43	Perlu Perbaikan
9	Penelitian	57	Cukup
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perlu Perbaikan
11	Kerja Sama	86	Contoh Baik
Komprehensif		64	Cukup